BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Saat ini pendidikan di Indonesia belum banyak mengalami perbaikan, dengan demikian kelemahan proses dan hasil pendidikan dari sebuah jalur pendidikan akan mempengaruhi indeks keberhasilan pendidikan secara keseluruhan. Hal ini tergambar dengan prestasi pendidikan di Indonesia tertinggal jauh di bawah negara-negara Asia lainnya, seperti Singapura, Jepang, dan Malaysia. Bahkan jika dilihat dari indeks sumberdaya manusia, salah satu indikatornya adalah sektor pendidikan, posisi Indonesia kian menurun dari tahun ke tahun, padahal Indonesia kini sudah menjadi bagian dari masyarakat dunia yang sudah tidak bisa dihindari. Indonesia sudah menjadi bagian dari kompetensi masyarakat dunia. Jika tidak bisa menjadi pemenang, maka akan menjadi yang kalah serta tertinggal dari masyarakat lainnya. Oleh sebab itu, persiapan sumber daya manusia yang berkualitas, kompetitif serta memiliki berbagai keunggulan komparatif menjadi sebuah keharusan yang menjadi perhatian dalam sektor pendidikan.[1]

Hal ini dibuktikan berdasarkan data dari UNICEF bahwa Indonesia berada dalam "*Medium Human Development"* atau berada di peringkat tengah dalam pengembangan sumber daya manusianya. Indikasi lain ketinggalan Indonesia, kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dan 12

[1] Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokratis*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 2

negara di Asia. Posisi Indonesia di bawah Vietnam. Indonesia memiliki daya saing rendah, yaitu hanya menduduki urutan ke-37 dari 57 negara di dunia. Menurut survei dari lembaga yang sama Indonesia hanya berpredikat sebagai *follower* bukan sebagai pemimpin teknologi dari S3 negara di dunia.

Dari berbagai studi dan pengamatan langsung di lapangan, hasil analisis menunjukkan bahwa paling tidak ada tiga faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan secara merata. Pertama, kebijakan penyelenggaraan pendidikan nasional yang berorientasi pada keluaran pendidikan (*output*) terlalu memusatkan pada masukan (*input*) dan kurang memperhatikan pada proses pendidikan. Kedua, penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara sentralistik, hal ini menyebabkan tingginya ketergantungan kepada keputusan birokrasi dan seringkali kebijakan pusat terlalu umum dan kurang menyentuh atau kurang sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah. Disamping itu segala sesuatu yang terlalu diatur menyebabkan penyelenggara sekolah kehilangan kemandirian, inisiatif, dan kreativitas. Hal tersebut menyebabkan usaha dan daya untuk mengembangkan atau meningkatkan mutu layanan dan keluaran pendidikan menjadi kurang termotivasi. Ketiga, peran serta masyarakat terutama orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini hanya terbatas pada dukungan dana. Padahal peran serta mereka sangat penting dalam proses-proses pendidikan antara lain pengambilan keputusan, pemantauan, evaluasi, dan akuntabilitas.[2]

---

[2] Wawan Kuswara, *School Based Management (SBM):* Format Madrasah Masa Depan dan Masa Depan Madrasah, (Bandung: Media Pembinaan, 2003), hal. 15

Yusufhadi Miarso menggunakan istilah partisipasi untuk mengatakan peran serta. Partisipasi menurutnya merupakan hal turut serta dalam suatu kegiatan. Pengertian masyarakat menurutnya adalah kumpulan individu yang menjalin kehidupan bersama sebagai suatu kesatuan yang besar, yang saling membutuhkan, memiliki ciri-ciri yang sama sebagai kelompok.[3]

Istilah masyarakat dalam UU No.20 Tahun 2003 diartikan sebagai kelompok warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan, sedangkan Umar Tirtarahardja dan La Sulo mengemukakan kaitan antara masyarakat dan pendidikan dapat ditinjau dari tiga segi, yaitu masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan, mempunyai peran dan fungsi edukatif, dan masyarakat sebagai sumber belajar.[4]

Dua pendapat tadi menggambarkan lingkup peran serta masyarakat secara menyeluruh mulai dari perencanaan sampai evaluasi. Nampak bahwa masyarakat dan pendidikan saling berkaitan dan saling topang. Sehingga keberhasilan pendidikan bukan saja menjadi tanggung jawab penyelenggara pendidikan saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat dan pemerintah. Masyarakat dan pemerintah terjun langsung ke tengah-tengah dunia pendidikan atau dapat dikatakan masyarakat turut berpartisipasi dalam pendidikan dan pemerintah memberikan dorongan berupa peraturan atau perundang-undangan.

---

[3] Yusufhadi Miarso, *Menyemai Teknologi Pendidikan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 706

[4] Umar Tirtorahardjo dan La Sulo, *Pengantar Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hal. 179

Peran serta masyarakat dalam pendidikan dikemukakan oleh Yusufhadi Miarso bertujuan untuk:[5]

1. Terbentuknya kesadaran masyarakat tentang adanya tanggung jawab bersama dalam pendidikan.
2. Terselenggaranya kerja sama yang saling menguntungkan (memberi dan menerima) antara semua pihak yang berkepentingan dengan pendidikan.
3. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya, meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan seperti dana, fasilitas, dan peraturan-peraturan termasuk perundang-undangan.
4. Meningkatkan kinerja madrasah yang berarti pula meningkatnya produktivitas, kesempatan memperoleh pendidikan, keserasian proses dan hasil pendidikan sesuai dengan kondisi anak didik dan lingkungan, serta komitmen dari para pelaksana pendidikan.

Hubungan madrasah dengan masyarakat pada hakikatnya merupakan suatu sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik di madrasah. dalam hal ini madrasah sebagai sistem sosial merupakan bagian integral dari sistem sosial yang lebih besar, yaitu masyarakat. Hubungan yang harmonis antara madrasah dan masyarakat ini semakin dirasakan pentingnya pada masyarakat yang telah menyadari dan memahami pentingnya pendidikan bagi anak-anak. Namun, tidak berarti pada masyarakat yang masih kurang menyadari pentingnya pendidikan, hubungan kerjasama ini tidak perlu dibina. Pada masyarakat yang

[5] Yusufhadi Miarso, *Menyemai Teknologi Pendidikan...*, hal. 709

kurang menyadari akan pentingnya pendidikan, madrasah dituntut lebih aktif dan kreatif untuk menciptakan hubungan kerja sama yang lebih harmonis.[6]

Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa Pendidikan merupakan kunci kemajuan, semakin baik kualitas pendidikan yang diselenggarakan oleh suatu masyarakat/bangsa tersebut. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.[7]

Apabila hubungan madrasah dengan masyarakat berjalan dengan baik, maka rasa tanggungjawab dan partisipasi masyarakat untuk memajukan madrasah juga akan baik dan tinggi. Agar tercipta hubungan dan kerjasama yang baik antara madrasah dan masyarakat, masyarakat perlu mengetahui dan memiliki gambaran yang jelas tentang madrasah yang bersangkutan. Gambaran dan kondisi madrasah ini dapat diinformasikan kepada masyarakat melalui laporan kepada orang tua peserta didik, buletin bulanan, penerbitan surat kabar, pameran madrasah, *open house*, peserta didik, radio dan televisi, serta laporan tahunan.[8]

Kepala madrasah yang baik merupakan salah satu kunci untuk bisa menciptakan hubungan yang baik antara madrasah dan masyarakat secara

---

[6] E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hal. 74-75

[7] Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, (Bandung: Citra Umbara), hal. 2

[8] E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*..., hal. 75

efektif karena harus menaruh perhatian tentang apa yang terjadi pada peserta didik di madrasah dan apa yang dipikirkan oleh orang tua tentang madrasah. Kepala madrasah dituntut untuk senantiasa membina dan meningkatkan hubungan kerja sama yang baik antara madrasah dan masyarakat guna mewujudkan madrasah yang efektif dan efisien.

Desentralisasi di bidang pendidikan merupakan satu aspek yang sangat penting dari upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam desentralisasi pendidikan bertujuan memperkuat kehidupan berdemokrasi melalui desentralisasi kekuasaan, sumber daya dan dana ke masyarakat tingkat sekolah.

Pemberian otonomi pendidikan yang luas pada sekolah merupakan kepedulian pemerintah terhadap gejala-gejala yang muncul di masyarakat serta upaya peningkatan mutu pendidikan secara umum. Pemberian otonomi ini menuntut pendekatan manajemen yang lebih kondusif di sekolah agar dapat mengakomodasi seluruh keinginan sekaligus memberdayakan berbagai komponen masyarakat secara efektif, guna mendukung kemajuan dan sistem yang ada di sekolah. Kerangka inilah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sebagai alternatif paradigma baru manajemen pendidikan yang ditawarkan. MBS merupakan suatu konsep yang menawarkan otonomi pada sekolah untuk menentukan kebijakan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu, efisiensi dan pemerataan pendidikan agar dapat mengakomodasi keinginan masyarakat

setempat serta menjalin kerja sama yang erat antara sekolah, masyarakat dan pemerintah.[9]

MBS sebagai salah satu pendekatan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan mendekati suatu permasalahan dari berbagai sudut pandang dan dalam perspektif yang lebih luas. Salah satu model yang banyak digunakan di negara-negara yang telah menerapkan MBS adalah dengan melibatkan masyarakat secara intensif. Bukan hanya karena pemerintah mulai bangkrut untuk membiayai pendidikan warganya, melainkan masyarakat memiliki kekuatan yang besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Masyarakat akan ikut bertanggung jawab terhadap kualitas pendidikan apabila mereka diberi peran yang cukup dalam pengambilan keputusan.

Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang makin besar sebagai amanat UUD 1995 dan UU No. 32 Tahun 2004, merupakan tantangan sekaligus peluang bagi para manajer pendidikan di daerah otonom untuk secara kreatif mengembangkan sekolah. Adanya MBS, maka kepala sekolah dalam mengatur dan mengurus sekolah sesuai dengan kepentingan masyarakat yang dilayaninya, menurut prakarsa sendiri.[10]

Manajemen sekolah model MBS ini berarti tugas-tugas manajemen sekolah ditetapkan menurut karakteristik-karakteristik dan kebutuhan-kebutuhan sekolah itu sendiri. Oleh karena itu, warga sekolah memiliki otonomi dan tanggung jawab yang lebih besar atas penggunaan sumber daya

---

[9] E. Mulyasa, *Manajemen Berbasi Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implikasi,* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 11

[10] Bedjo Sujanto, *Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah*: *Model Pengelolaan Sekolah Di Era Otonomi Daerah* (Jakarta: Sagung Seto, 2007), hal 30-31

sekolah guna memecahkan masalah sekolah dan menyelenggarakan aktivitas pendidikan yang efektif demi perkembangan jangka panjang sekolah.

MBS memberikan kekuasaan penuh kepada sekolah secara individual, dalam proses pengambilan keputusan sekolah tidak boleh berada di satu tangan saja. Ketika MBS belum diterapkan, proses pengambilan keputusan sekolah sering kali dilakukan sendiri oleh pihak sekolah secara internal yang dipimpin langsung oleh kepala sekolah. Namun, dalam kerangka manajemen berbasis sekolah proses pengambilan keputusan mengikutkan partisipasi dari berbagai pihak internal, eksternal, maupun jajaran birokrasi sebagai pendukung dalam pengambilan keputusan harus dilaksanakan secara kolektif di antara *stakeholder* sekolah.

MBS juga memiliki potensi yang besar untuk menciptakan kepala sekolah, guru, dan administrator yang profesional. Dengan demikian, sekolah akan bersifat responsif terhadap kebutuhan masing-masing siswa dan masyarakat sekolah. Prestasi belajar siswa dapat dioptimalkan melalui partisipasi langsung orang tua dan masyarakat.[11]

Implementasinya dalam MBS harus didukung oleh partisipasi masyarakat dan orang tua peserta didik yang tinggi. Orang tua siswa dan masyarakat tidak hanya mendukung sekolah melalui bantuan keuangan, tetapi melalui komite sekolah, orang tua dan masyarakat merumuskan dan mengembangkan program-program yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran.

---

[11] Nurkolis, *Manajemen Berbasis Sekolah: Teori, Model dan Aplikasi*, (Jakarta: Grasindo, 2003), hal. 1-8

Sejalan dengan upaya reformasi pendidikan nasional melaui otonomi daerah, hubungan sekolah dengan masyarakat secara *education* dan *cultural* khususnya orang tua murid dan masyarakat sekitar sekolah juga perlu direformasi sehingga tanggung jawab pendidikan bukan hanya pada sekolah. Salah satunya adalah dengan membentuk Komite Sekolah atau Majelis Madrasah untuk memberdayakan orang tua murid dalam pendidikan.

Hal ini tercantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional (Kepmendiknas) Nomor 004/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, yang berbunyi sebagai berikut:

a. Bahwa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional melalui upaya peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi penyelenggaraan pendidikan dan tercapainya demokratisasi pendidikan, perlu adanya dukungan dan peran serta masyarakat yang lebih optimal.
b. Bahwa dukungan dan peran serta masyarakat perlu didorong untuk bersinergi dalam suatu wadah Dewan Pendikan dan Komite Sekolah yang mandiri.
c. Bahwa sehubungan dengan a dan b yang memfasilitasi terbentuknya Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.[12]

Hal ini dipertegas pula dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 pasal 54 ayat [1] dan [2] yang berbunyi:

[1] Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
[2] Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.[13]

---

[12] Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem...*, hal. 109
[13] *Ibid.*, hal. 27

Partisipasi masyarakat menjadi sangat penting karena pendidikan merupakan kegiatan yang berlangsung di tengah masyarakat itu sendiri, bahkan dilakukan oleh masyarakat dan dimanfaatkan pula oleh masyarakat. Dapat pula dikatakan bahwa berhasil tidaknya pendidikan dapat dipengaruhi oleh masyarakat dan hasil pendidikan akan mempengaruhi masyarakat.

MTsN 3 Tulungagung sebagai salah satu wujud dari sistem pendidikan madrasah di Indonesia juga terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan. Sekolah yang berada di kawasan Kecamatan Rejotangan dalam dekade terakhir ini terus menunjukkan exsistensinya. MTsN 3 Tulungagung adalah salah satu sekolah yang berstatus negeri.

Mengingat partisipasi masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan MBS. Maka partisipasi masyarakat Desa Aryojeding sangat besar pengaruhnya bagi pelaksanaan MBS di MTsN 3 Tulungagung, serta mendorong masyarakat yang ada di desa tersebut untuk terlibat dalam pendidikan serta menyampaikan aspirasinya kepada pihak madrasah, tentang program dan perbaikan yang seharusnya dilakukan pihak madrasah, meskipun tidak semua lapisan masyarakat sadar dan sanggup merespon tentang program yang akan dilakukan pihak madrasah.

Berangkat dari fenomena saat ini memandang bahwa pentingnya partisipasi masyarakat secara aktif dalam rangka pelaksanaan manajemen berbasis sekolah khususnya di MTsN 3 Tulungagung. Berdasarkan penjabaran yang telah diuraikan diatas, peneliti menganggap penting untuk melakukan kajian dan mengetahui lebih jauh hal tersebut melalui penelitian

yang berjudul **"PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH DI MTsN 3 TULUNGAGUNG"**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka penulis memfokuskan pada Partisipasi masyarakat di MTsN 3 Tulungagung adapun pertanyaan penelitiannya sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan MBS di MTsN 3 Tulungagung?
2. Bagaimana implementasi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan MBS di MTsN 3 Tulungagung?
3. Bagaimana kendala partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan MBS di MTsN 3 Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang dirumuskan, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan MBS di MTsN 3 Tulungagung.
2. Untuk mendeskripsikan implementasi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan MBS di MTsN 3 Tulungagung.

3. Untuk mendeskripsikan kendala partisipasi masyarakat dalam MBS di MTsN 3 Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai sumbangsih untuk memperkaya khazanah ilmiah dan dapat memberikan konstribusi pada dunia pendidikan tentang Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah, sehingga dapat dijadikan sebagai konsep dan langkah alternatif dalam pengembangan manajemen madrasah yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat.

2. Secara Praktis

a. Bagi Perpustakaan IAIN Tulungagung

Hasil penelitian ini berguna untuk menambah ilmu di bidang pendidikan terutama berkaitan dengan Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah.

b. Bagi MTsN 3 Tulungagung

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dan strategi dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat melalui MBS, serta dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk mengambil kebijakan tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

c. Bagi Kepala Sekolah

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai landasan sebagaimana tugas dan kewajiban sebagai seorang kepala sekolah untuk berpartisipasi dalam melaksanakan maupun memantau program sekolah.

d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat digunakan, khususnya orang tua siswa sebagai bahan pertimbangan untuk ikut berpartisipasi aktif terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

e. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh peneliti sebagai bahan kajian bagi peneliti untuk menambah dan memperluas penguasaan materi tentang partisipasi masyarakat dan sebagai persyaratan dalam memperoleh gelar S-1 pada Institut Agama lslam Tulungagung.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dalam judul penyusunan laporan penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan definisi yang tepat dan batasan istilah yang digunakan agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran, yaitu:

1. Penegasan Konseptual

a. Partisipasi adalah salah satu bentuk kepedulian masyarakat atas penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Partisipasi masyarakat berarti

keterlibatan masyarakat secara aktif dalam berbagai bentuk seperti ide, saran, pendapat, dana, gagasan, keterampilan dan jasa. Keterlibatan mereka diarahkan untuk meningkatkan hak dan tanggung jawab dalam dunia pendidikan, serta diharapkan dapat menyukseskan program pendidikan yang telah direncanakan supaya sekolah dapat berfungsi dengan baik.

b. Manajemen Berbasis Sekolah adalah model pengelolaan yang memberikan otonomi (kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada sekolah), memberikan keluwesan kepada sekolah, mendorong partisipasi secara langsung dari warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.[14]

2. Penegasan Operasional

Dalam penulisan skripsi ini untuk menghindari kesalah pahaman, maka perlu adanya penegasan operasional. Skripsi iin berjudul ”*Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah di MTsN 3 Tulungagung”* yang memfokuskan pada bagaimana partisipasi masyarakat terlibat secara aktif memberikan ide, saran, pendapat, dana, gagasan, keterampilan dan jasa untuk meningkatkan hak dan tanggung jawabnya, serta diharapkan dapat menyukseskan program pendidikan yang telah direncanakan misalnya dalam pelaksanaan MBS

[14] Rohiat, *Manajemen Sekolah: Teori Dasar dan Praktik dilengkapi dengan Contoh Rencana Strategi dan Rencana Operasional,* (Bengkulu: Refika Aditama, 2008), hal. 47

melalui pendekatan sistem bentuk, implementasi dan kendala di MTsN 3 Tulungagung.

F. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari 6 bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab dan sebelum memasuki bab pertama terlebih dahulu peneliti sajikan beberapa bagian permulaan secara lengkap yang sistematikanya meliputi halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran dan abstrak.

Bagian isi meliputi Bab I Pendahuluan, terdiri dari konteks penelitian, setelah menentukan konteks penelitian penulis akan memfokuskan penelitian sebagai dasar acuan dalam penelitian sekaligus menentukan tujuan penelitian. Setelah itu penulis mendiskripsikan tentang manfaat dan penegasan istilah dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka ini peneliti akan menuliskan tentang tinjauan partisipasi masyarakat, tinjauan manajemen berbasis sekolah, tinjauan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah, Penelitian Terdahulu, dan Paradigma Penelitian.

Bab III Metode Penelitian ini penulis akan menjabarkan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian akan memaparkan data dan menuliskan tentang temuan-temuan dan sekaligus analisis data sehingga ditemukan hasil penelitian.

Bab V laporan hasil pembahasan sekaligus menuliskan tentang analisis data sehingga ditemukan hasil penelitian.

Bab VI Penutup peneliti akan mengambil kesimpulan dan saran guna memudahkan pemahaman terhadap hasil penelitian.

Bab akhir memuat daftar rujukan yang merupakan daftar bukti referensi oleh peneliti, kemudian diberi juga lampiran-lampiran yang memuat dokumen-dikumen terkait penelitian.